



**BNPB**

# KURIKULUM PELATIHAN DASAR MANAJEMEN BENCANA BERBASIS KOMPETENSI



**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
TAHUN 2023**

## **KURIKULUM PELATIHAN DASAR MANAJEMEN BENCANA BERBASIS KOMPETENSI**

### **Penanggung Jawab**

Kheriawan, S.Pd.I., M.M. – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

### **Penulis**

1. Neri Egi Rusmana S.Si, M.Pd – Widyaiswara Ahli Pertama Pusdiklat PB
2. Wahyu Indriyadi, S.T., M.Env. Mgmt – Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Pusdiklat PB
3. Noviana S.Si – Analis Pelaporan Pusdiklat PB
4. Adhitya Nugraha Iskandar, S.Pd. – Analis Bencana BNPB

### **Editor**

1. Nur'anisa, S.Pd. – Perancang Diklat Pusdiklat PB
2. Imam Arif Pujiyanto, S.T – Staf Pusdiklat PB

### **Kontributor**

1. Dr. Ir. Dody Ruswandi, MSCE. – Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat PB
2. Dr. Ir. Harmensyah, Dipl. S.E., M.M. – Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat PB
3. Ir. Medi Herlianto, CES, M.M. – Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat PB
4. dr. Bagus Tjahjono, M.P.H – Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat PB
5. R.Theodora Eva Yuliana Aritonang, A.Ks., M.Si (Han) – Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pusdiklat PB
6. Apriyuanda Giyant Bayu Pradana, M.Sc. – Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusdiklat PB
7. Widyaiswara Pusdiklat PB
8. Staf Bidang Program dan Evaluasi Pusdiklat PB
9. Staf Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusdiklat PB

Edisi Desember 2023

Hak Cipta @2023 pada penulis;

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi Kurikulum Pelatihan Dasar Manajemen Bencana ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin dari penulis.

Pusdiklat BNPB

Gedung Ina-DRTG Komplek Indonesia Peace and Security Center Jl. Anyar, Desa Tangkil Sentul, Kecamatan Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat 16810

Telepon: 021- 29618775, Situs: <http://www.pusdiklat.bnpb.go.id>

ISBN : .....

## KATA PENGANTAR

Merujuk pada Sasaran Kebijakan strategis Penanggulangan Bencana 2020-2024 yaitu “Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi” dengan mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pelatihan sebagai salah satu upaya meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola risiko bencana yang terpadu dan efektif.

Adanya Kurikulum Pelatihan Dasar Manajemen Bencana sebagai rujukan para pihak dalam melaksanakan pelatihan yang akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan.

Ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kurikulum ini khususnya bagi anggota tim kerja review kurikulum, tim penulis, tim review, observer, dan peserta uji coba. Kurikulum ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lembaga penyelenggara Pelatihan Dasar Manajemen Bencana. Namun demikian, saran dan masukan dari peserta dan pemangku kepentingan bagi pengembangan materi pembelajaran tetap kami butuhkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Penanggulangan Bencana BNPB



Kheriawan

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kerangka Dasar Kurikulum.....	3
C. Tujuan Kurikulum.....	4
D. Kompetensi Lulusan.....	5
E. Pengertian.....	5
<b>BAB II STRUKTUR KURIKULUM.....</b>	<b>7</b>
A. Struktur Mata Pelatihan.....	7
B. Ringkasan Materi.....	8
C. Metode Pembelajaran.....	16
<b>BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN.....</b>	<b>17</b>
A. Ruang Lingkup.....	17
B. Perencanaan.....	17
C. Mekanisme Penyelenggaraan.....	18
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>23</b>
<b>Lampiran</b>	
1. Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP)	
2. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (BPMP)	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara yang paling rawan terhadap bencana dibandingkan negara-negara lain di dunia, data ini dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana atau UN-ISDR. Tingginya tingkat kerawanan bencana di Indonesia merupakan hasil perhitungan dari jumlah manusia yang terancam risiko kehilangan nyawa bila bencana alam terjadi. Adapun, ancaman bencana yang dengan peringkat tertinggi di Indonesia adalah tsunami, tanah longsor dan erupsi gunung berapi; yang disusul dengan gempa bumi dan banjir bahkan terjadinya pandemi COVID-19 yang berlangsung selama 3 tahun dari tahun 2020 sampai 2022 yang menelan banyak korban jiwa.

Dalam konteks penanggulangan bencana, sejumlah kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan bencana menjadi salah satu aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana, selain kegiatan pada masa tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tiga tahap, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara khusus dalam pasal 34, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana terdiri dari dua situasi, yaitu tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Penjelasan mengenai berbagai aktivitas yang dapat dilakukan dalam kedua situasi ini memiliki kesamaan, yaitu menyebutkan tentang pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat sebagai kegiatan mitigasi dan juga kegiatan pada daerah yang tidak terjadi bencana (pasal 18 dan pasal 22).

Pernyataan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB. Pasal 5 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah ini menyebutkan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana. Selain itu, pasal 7 ayat 1 juga menyatakan bahwa upaya non fisik dalam rangka pengurangan risiko bencana adalah kegiatan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelatihan ini terdapat dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa:

1. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
3. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pentingnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana juga diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kegiatan pelatihan dianggap sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam rangka membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Berkaitan dengan hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 dan Nomor 8 Tahun 2020 memberikan penjelasan mengenai tugas Pusdiklat PB yaitu melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.

Kemudian, fungsi Pusdiklat PB BNPB adalah:

1. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana dan simulasi penanggulangan secara nasional dan internasional;
2. pengembangan program dan akreditasi pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
3. penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
4. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar, struktural, fungsional, dan teknis lainnya bagi sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana;
5. penyelenggaraan sertifikasi dan uji kompetensi profesi; dan
6. penyiapan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, Pusdiklat PB BNPB berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 577/K.1/PDP.09/2021 Tentang Penetapan Pusdiklat PB BNPB sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi telah reakreditasi sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Penanggulangan Bencana. Berkaitan dengan hal itu, Pusdiklat PB BNPB melakukan berbagai upaya dan langkah berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan, mulai dari analisis kebutuhan pelatihan, penyusunan desain kurikulum, penyelenggaraan pelatihan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelatihan. Dalam konteks penyelenggaraan pelatihan, pelatihan yang menjadi prasyarat bagi penyelenggaraan sejumlah pelatihan teknis penanggulangan bencana lainnya adalah Pelatihan Dasar Manajemen Bencana.

Dalam penyelenggaraan PB ada bermacam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh para pelaku PB (profesi PB), seperti pencarian dan pertolongan, koordinator hunian sementara, komandan pos komando tanggap darurat, pengelola logistik dan peralatan, pelaksana kajian pascabencana, dan lain-lain. Agar profesi PB dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 tahun 2007) maka para pelaku PB harus kompeten dan tersertifikasi yang memenuhi standar performa kompetensi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengakuan atas kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja, yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standard kompetensi nasional dan/atau internasional.

Sumber daya manusia yang kompeten, serta kepadanya diberikan pengakuan dan penghargaan profesi di bidang penanggulangan bencana (PB) adalah sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penanggulangan Bencana (SKKNI-PB). SKKNI-PB itu sendiri telah ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhahuri melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 401 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan



Penyediaan Layanan untuk Masyarakat dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, dan Ketertiban Sub Golongan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Kelompok Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran pada tanggal 30 Desember 2014 di Jakarta.

Pelatihan Dasar Manajemen Bencana merupakan pelatihan dasar yang diikuti peserta sebelum dapat melanjutkan pada pelatihan tahap lanjutan. Pelatihan Dasar Manajemen Bencana berisikan materi penyelenggaraan penanggulangan bencana, materi dalam Pelatihan Dasar Manajemen Bencana mengintegrasikan secara aktif SKKNI kode unit: O.842340.001.01 yaitu Melakukan Kerja Efektif pada Sektor Penanggulangan Bencana diharapkan dapat semakin memperkuat kemampuan peserta terkait kompetensi kerja efektif pada materi Pelatihan Dasar Manajemen Bencana.

## **B. Kerangka Dasar Kurikulum**

### **1) Landasan Konseptual**

Bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas ancaman, risiko dan dampak bencana dimana Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk : (a) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, (b) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, (c) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, (d) menghargai budaya lokal, (e) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, (f) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, dan (g) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **2) Landasan Operasional**

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang antara lain mengatur penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai klaster. KKNI ini terdiri atas 9 jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 sebagai jenjang terendah dan jenjang 9 sebagai jenjang tertinggi. Jenjang tersebut terdiri atas:
  - a. Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator.
  - b. Jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam teknisi atau analis.
  - c. Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.
2. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan.
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2014 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Penyediaan Layanan untuk Masyarakat dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, dan Ketertiban Sub Golongan Ketertiban dan Keamanan

Masyarakat Kelompok Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran

4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana Sub Bidang Prabencana dan Pascabencana
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penjenjangan Pelatihan Teknis, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Pelatihan Teknis Substantif  
Pelatihan teknis substantif adalah pelatihan yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi peserta sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
  - b. Pelatihan Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen  
Pelatihan Teknis Umum/ Administrasi dan Manajemen adalah pelatihan yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat umum dalam rangka pencapaian kompetensi PNS terkait dengan tugas tugas yang bersifat umum, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi.
7. Kurikulum dan modul Dasar Manajemen Bencana, Pusdiklat PB BNPB, Tahun 2018.

### 3) Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada BAB IV Pasal 5 memberi amanat bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang kemudian dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Sedangkan Pasal 31 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi; (a) sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, (b) kelestarian lingkungan hidup, (c) kemanfaatan dan efektivitas; dan (d) lingkup luas wilayah, dimana dalam meliputi : prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2) bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sedangkan pada Pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana adalah penitikberatan pada upaya-upaya yang bersifat pencegahan pada prabencana, kemudahan akses pada saat tanggap darurat, pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.

## C. Tujuan

### 1) Tujuan Umum

Tujuan umum disusunnya dokumen ini untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada peserta dalam menyelenggarakan Dasar Manajemen Bencana yang sesuai



dengan peraturan, norma, kaidah dan standard yang berlaku.

## 2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus disusunnya kurikulum agar setelah mengikuti Pelatihan Dasar Manajemen Bencana para peserta diharapkan mampu menjelaskan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana sesuai SKKNI kode unit: O.842340.001.01 yaitu Melakukan Kerja Efektif pada Sektor Penanggulangan Bencana.

## D. Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan yang ingin dicapai dalam Pelatihan Dasar Manajemen Bencana ini adalah: peserta dapat memahami Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia, serta memahami cara melakukan kerja efektif pada sektor penanggulangan bencana (mengacu kepada SKKNI KODE UNIT: O.842340.001.01).

## E. Pengertian

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut diklat adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan serta sikap bagi ASN sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan masing – masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
2. Pelatihan adalah suatu kegiatan yang memberikan tuntunan penyelesaian persoalan/masalah yang bersifat teknis/subtansi.
3. Klasikal adalah Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang strategi pembelajarannya sebagian besar dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
4. Daring yang selanjutnya disebut Pelatihan Mandiri adalah pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh Peserta Pelatihan Dasar Manajemen Bencana secara daring dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Pusdiklat PB.
5. Blended Learning adalah Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan proses pembelajaran secara daring. Selain itu, juga berarti pembelajaran secara luas dengan berbagai teknologi/media yang terintegrasi dengan kegiatan kelas konvensional tatap muka.
6. Instansi pembina Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang selanjutnya disebut Instansi pembina adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.
7. Peserta adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pelatihan Dasar Manajemen Bencana.
8. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Jabatan Fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawaban wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
9. Tenaga Pengajar adalah pejabat atau pegawai yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang Pendidikan dan Pelatihan dan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diampu.
10. Narasumber adalah orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pada kegiatan pelatihan. Narasumber tidak terbatas dari Pejabat Pemerintahan, Praktisi dan TNI/POLRI/akademisi yang memiliki keahlian/kepakaran pada bidang tertentu.
11. Penceramah adalah Pejabat Negara/ Pegawai ASN/TNI/POLRI/Pakar/Profesional lain yang memberikan wawasan pengetahuan dan sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta. Informasi/pengetahuan/keterampilan. Khusus untuk Pegawai ASN/anggota TNI/POLRI, Honorarium digunakan untuk kegiatan pengajaran Pendidikan dan Pelatihan yang materinya diampu oleh Pejabat Eselon II ke atas/setara.

12. Tenaga Pendamping adalah pegawai ASN atau Non Pegawai ASN yang bertugas mendampingi Peserta dalam pelaksanaan materi pilihan kunjungan lapangan, mitigasi praktis dan muatan lokal.
13. Penyelia adalah pimpinan yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan pelatihan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, sasaran, daftar mata Pelatihan, serta silabi masing – masing Pelatihan.
15. Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah.
16. Kunjungan Lapangan adalah sarana bagi peserta diklat untuk mencocokkan antara teori yang diperoleh di kelas, pengalaman peserta di tempat tugas masing-masing, dan kenyataan yang diamati di tempat kunjungan.
17. Mitigasi praktis adalah kegiatan penguatan kesiapsiagaan bencana, tentang persiapan saat sebelum ancaman bencana terjadi dan bagaimana cara kita menyelamatkan diri dan melakukan evakuasi secara mandiri ketika bencana terjadi
18. Penjaminan mutu adalah tim yang melakukan kegiatan pengendalian mutu maupun pendampingan terhadap penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan standar pelatihan
19. Bahan ajar adalah serangkaian materi yang didesain secara menarik yang disajikan oleh pengajar dalam bentuk power point atau alat peraga.
20. Evaluasi pelatihan adalah pengumpulan informasi yang dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif serta secara sistematis yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelatihan.
21. Pelaporan adalah penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.
22. Synchronous adalah pembelajaran yang dilakukan secara real time yaitu dimana pembelajaran yang dilakukan antara tenaga pengajar dengan peserta pelatihan dapat melakukan komunikasi dua arah secara langsung memberikan feedback yang dilaksanakan secara online.
23. Asynchronous adalah pembelajaran yang dilakukan menggunakan LMS (Learning Management System), dimana materi sudah dipersiapkan oleh tenaga pengajar supaya dapat diakses oleh peserta pelatihan secara fleksibel yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.
24. E-learning adalah adalah pembelajaran yang merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

## BAB II

### STRUKTUR KURIKULUM

#### A. Struktur Mata Pelatihan

Struktur Kurikulum Pelatihan Dasar Manajemen Bencana ini adalah struktur yang dikeluarkan secara resmi oleh Pusdiklat PB BNPB sebagai badan pengakreditasi diklat teknis kebencanaan, sehingga menjadi acuan setiap Lembaga atau instansi yang akan menyelenggarakan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana.

**Tabel 1. Mata Pelatihan, Materi Pokok dan Alokasi Waktu**

NO	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	Model Pembelajaran		
			Klasikal	Online	
				Sync	Async
<b>I. Materi Utama</b>					
<b>I.a. Dasar</b>					
1	Pengarahan Program		1	1	0
2	Dinamika Kelompok	1. Dinamika Kelompok 2. Kerjasama tim yang efektif	4	4	0
3	RTL		2	2	0
<b>I.b Inti</b>					
1	Kebencanaan	1. Konsep Bencana 2. Jenis Bencana 3. Karakteristik Bencana	3	2	1
2	Dasar dan Sistem Penanggulangan Bencana	1. Konsep dan Sistem PB 2. Praktik baik ( <i>best practice</i> ) PB 3. Prinsip dan Etika PB	6	3	3
3	Manajemen Bencana	1. Manajemen Risiko Bencana/Prabencana	4	3	1
		2. Manajemen Penanganan Darurat Bencana	4	3	1
		3. Manajemen Pemulihan Bencana (Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana)	4	3	1
4	Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	1. Sistem Manajemen Logistik Dan Peralatan 2. Klaster Logistik	3	2	1
5	Manajemen Data, Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana	1. Data & Informasi Bencana 2. Teknologi Informasi Bencana 3. Komunikasi Bencana	3	2	1

NO	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	Model Pembelajaran		
			Klasikal	Online	
				Sync	Async
6	Kerjasama Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana	1. Kerjasama Multipihak dalam Penanggulangan Bencana 2. Klaster Penanggulangan Bencana 3. Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Bencana	3	2	1
<b>I.c. Penunjang</b>					
1	Sosialisasi Sertifikasi PB		2	2	0
2	Visitasi atau praktek keterampilan praktis lapangan (Opsi materi: mendirikan tenda darurat, dapur lapangan, mitigasi praktis, atau sesuai kebutuhan peserta)		4	4	0
<b>Materi Tambahan</b>					
1	Pembukaan dan Penutupan				
2	<i>Pre-test</i> dan <i>Post-test</i>				
<b>TOTAL</b>			<b>37 (43) JP</b>		

Keterangan : 1 JP = 45 Menit

## B. Ringkasan Materi

Ringkasan materi kurikulum pelatihan dasar manajemen bencana berbasis kompetensi adalah sebagai berikut :

### 1. Pengarahan Program

#### a. Deskripsi Singkat

Pengarahan program adalah proses penjelasan singkat kegiatan pelatihan yang akan diikuti oleh peserta selama durasi tertentu. Penjelasan ini adalah meliputi (tidak terbatas pada) tujuan, sasaran, kurikulum, durasi dan agenda pelatihan, model dan metode yang digunakan, proses evaluasi, dan harapan kompetensi yg dicapai.

#### b. Hasil belajar

Peserta mampu menjelaskan secara singkat rencana pelatihan selama durasi tertentu yang akan diikuti.

#### c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat :

- 1) Menjelaskan secara singkat rencana pelatihan yang akan diikuti peserta

#### d. Materi Pokok dan Submateri pokok

- 1) Paparan Rencana pelatihan yang akan diikuti oleh peserta

#### e. Waktu: Alokasi waktu 1 JP

### 2. Mata Pelatihan Kebencanaan

#### a. Deskripsi Singkat

Materi ini memberikan pemahaman konsep, jenis, dan karakteristik bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jika kita mencermati, maka kita mendapati tiga komponen dalam pengertian-pengertian di atas, yaitu bencana, kejadian mengancam (bisa alam maupun non alam), dan faktor manusia. Implikasinya adalah bencana dan kejadian ancaman (selanjutnya disebut ancaman) merupakan dua hal yang berbeda, ancaman dapat menjadi bencana apabila manusia dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kemampuan menghadapi ancaman atau kerentanan terhadap bencana. Setiap jenis bencana mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan masalah yang diakibatkannya dimana penetapannya ditentukan oleh komponen penyebab bencana itu sendiri dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Secara keseluruhan karakteristik bencana di Indonesia dipengaruhi oleh posisi geologis, posisi astronomis, dan perilaku manusianya yang menghasilkan berbagai bencana, yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin badai, gelombang badai/pasang, gempa bumi, letusan gunung api, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit.

b. Hasil Belajar

Peserta mampu menjelaskan konsep, jenis dan karakteristik bencana.

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan konsep bencana.
- 2) Membedakan jenis-jenis bencana.
- 3) Menjelaskan karakteristik bencana.

d. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

- 1) Konsep Bencana
  - Definisi bencana
  - Pandangan terhadap bencana
- 2) Jenis Bencana
  - Jenis bencana
- 3) Karakteristik Bencana
  - Karakteristik bencana

e. Waktu

Alokasi waktu : 3 JP (135 menit)

3. Mata Pelatihan Dasar dan Sistem Penanggulangan Bencana

a. Deskripsi Singkat

Materi ini menjelaskan prinsip-prinsip, dan sistem penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanganan bencana sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan, pengurangan (mitigasi), kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Tujuan penanggulangan bencana untuk melindungi masyarakat dari bencana dan melindungi dari dampak yang ditimbulkannya. Penanggulangan Bencana menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; nondiskriminatif; dan nonproletisi, beserta penjelasan berbagai prinsip penanggulangan bencana dalam ranah internasional beserta etika yang wajib diikuti dalam penanggulangan bencana.

Sistem penanggulangan bencana adalah sistem pengaturan yang menyeluruh tentang kelembagaan, penyelenggaraan, tata kerja dan mekanisme serta pendanaan dalam PB. Sistem ini ditetapkan dalam pedoman/panduan atau peraturan dan perundang-undangan. Di Indonesia sistem PB didasarkan pada kelembagaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sistem Nasional PB berupaya untuk menuju penanggulangan bencana yang tepat di

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut telah terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaan bencana dari tingkat nasional hingga daerah, diantaranya dalam hal hukum, peraturan dan perundangan, kelembagaan, perencanaan, penyelenggaraan PB, pengelolaan sumber daya, pendanaan dan etika bagaimana kita menghadapi bencana.

b. Hasil Belajar

Peserta mampu menjelaskan konsep, sistem, praktik baik serta prinsip dan etika dalam penanggulangan bencana.

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan konsep dan sistem penanggulangan bencana.
- 2) Menjelaskan praktik baik (*best practice*) penanggulangan bencana
- 3) Menjelaskan prinsip dan etika penanggulangan bencana.

d. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

- 1) Konsep dan Sistem Penanggulangan Bencana
  - Konsep penanggulangan bencana
  - Kerangka sistem penanggulangan bencana
- 2) Praktik baik (*best practice*) penanggulangan bencana
- 3) Prinsip dan Etika Penanggulangan Bencana
  - Prinsip penanggulangan bencana nasional
  - Prinsip penanggulangan bencana internasional
  - Etika penanggulangan bencana

e. Waktu

Alokasi waktu : 6 JP (270 menit)

#### 4. Mata Pelatihan Manajemen Bencana

a. Deskripsi Singkat

Materi ini menjelaskan fase bencana dan ruang lingkupnya dalam manajemen efektif penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap, dan pascabencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana. Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

b. Hasil Belajar

Peserta mampu menjelaskan manajemen bencana.

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan manajemen pra bencana.
- 2) Menjelaskan manajemen penanganan darurat bencana.
- 3) Menjelaskan manajemen pemulihan bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana).

d. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

- 1) Manajemen pra-bencana



- Manajemen risiko bencana
  - Pengkajian risiko bencana
  - Kesiapsiagaan
- 2) Manajemen Penanganan Darurat Bencana
- Pengertian penanganan darurat bencana
  - Upaya penanganan darurat
  - Mekanisme penyelenggaraan penanganan darurat bencana
  - Pembiayaan penanganan darurat bencana
  - Dukungan psikososial
- 3) Manajemen Pemulihan Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana)
- Konsep pemulihan (kebijakan RR)
  - Perencanaan pemulihan
  - Aktivitas pemulihan pasca bencana
  - Pendanaan kegiatan pasca bencana
- e. Waktu  
Alokasi waktu : 12 JP (540 menit).

## 5. Mata Pelatihan Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

### a. Deskripsi Singkat

Materi ini menjelaskan manajemen efektif logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana. Amanah dari Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa BNPB mempunyai tugas membangun sistem manajemen logistik dan peralatan. Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat tanggap darurat bencana dan pada pasca bencana. Faktor utama yang dapat mendukung berjalannya sistem logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana adalah: kemampuan infrastruktur, ketersediaan dan jumlah alat transportasi penanggulangan bencana baik secara nasional, regional, lokal maupun setempat.

Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi. Sumber logistik bersumber dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Jenis logistik, meliputi logistik kemanusiaan, militer, dan komersial. Logistik kemanusiaan untuk menyelamatkan penyintas dan harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan, efisien dan hemat biaya. Sedangkan, peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

### b. Hasil Belajar

Peserta mampu menjelaskan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

### c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana
- 2) Menjelaskan klaster logistik penanggulangan bencana.

### d. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

- 1) Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan
  - Definisi manajemen logistik dan peralatan
  - Prinsip manajemen logistik dan peralatan

- Tahapan manajemen logistik dan peralatan
  - Jenis logistik dan peralatan
- 2) Klaster Logistik
- Definisi klaster logistik
  - Pembentukan struktur organisasi klaster
  - Tahapan penyelenggaraan klaster logistik pra, saat sampai pasca
- e. Waktu  
Alokasi waktu : 3 JP (135 menit)

## 6. Mata Pelatihan Manajemen Data, Informasi dan Komunikasi Bencana

### a. Deskripsi Singkat

Materi ini menjelaskan manajemen efektif data, informasi, dan komunikasi dalam penanggulangan bencana. Data adalah segala sesuatu hal yang menjadi sumber yang dikelola menjadi informasi. Sistem informasi bencana adalah suatu kumpulan modul atau komponen mengenai kejadian-kejadian bencana mulai dari pengumpulan, pengelolaan, proses, penyimpanan, analisa, dan pendistribusian informasi mengenai bencana. Peran informasi dan komunikasi adalah tersedia informasi penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan akurat sebagai kebutuhan untuk menganalisis upaya penanggulangan bencana. Tersedianya informasi pada tahap prabencana, tanggap, dan pascabencana. Sedangkan komunikasi bencana merupakan suatu proses penyampaian pesan mengenai bencana dari satu pihak kepada pihak lain baik dilakukan secara verbal maupun nonverbal.

Ada dua aspek terpenting dalam komunikasi, adalah informasi dan komunikasi. Gangguan terhadap fungsi infrastruktur informasi dan komunikasi, ketidakjelasan mekanisme hingga informasi yang simpang siur menyulitkan upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh banyak pihak, terutama bagi para penyintas. Untuk memperbaiki infrastruktur informasi dan komunikasi di lokasi bencana tentu membutuhkan waktu yang relatif lama jika menggunakan cara biasa. Karena itu, dirumuskan dan diterapkan alternatif-alternatif infrastruktur komunikasi yang efektif terutama dalam masa tanggap darurat bencana.

### b. Hasil Belajar

Peserta mampu menjelaskan manajemen data, informasi dan komunikasi bencana.

### c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan data & informasi bencana
- 2) Menjelaskan manajemen teknologi informasi
- 3) Menjelaskan komunikasi efektif kebencanaan.

### d. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

- 1) Manajemen Data dan Informasi Kebencanaan
  - Pengertian data dan informasi bencana
  - Teknologi informasi bencana
  - Pengelolaan sistem informasi (satu data bencana)
- 2) Manajemen Teknologi Informasi
  - Teknologi jaringan saat darurat
- 3) Komunikasi Kebencanaan
  - Pengertian komunikasi
  - Komunikasi kebencanaan

### e. Waktu

Alokasi waktu : 3 JP (135 menit)

## 7. Mata Pelatihan Dinamika Kelompok

### a. Deskripsi Singkat

Peserta diajak untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan peserta lain sebagai sebuah tim. Kemudian, mereka diarahkan untuk saling mengenal dan membuat peserta merasa dirinya siap dan nyaman dengan suasana pelatihan melalui permainan. Selanjutnya dijelaskan tujuan, pendekatan, dan struktur pelatihan sehingga peserta memahami gambaran besar pelatihan ini. Aktivitas selanjutnya adalah memetakan harapan, kekuatiran, dan kontribusi fasilitator dan peserta. Setelah itu peserta diajak membuat kesepakatan-kesepakatan untuk membentuk komitmen bersama dalam perilaku konsisten yang mendukung keberhasilan pelatihan.

### b. Hasil Belajar

Peserta mampu menjelaskan dinamika kelompok.

### c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan dinamika kelompok
- 2) Membangun kerjasama tim yang efektif

### d. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

#### 1) Dinamika kelompok

- Pengertian dinamika kelompok
- Proses pembelajaran dinamika kelompok
- Mengenal diri sendiri dan anggota kelompok
- Pembentukan kelompok Kerjasama dengan peserta lain dalam tim

#### 2) Kerjasama tim yang efektif

- Membangun kerjasama tim
- membangun komunikasi yang efektif
- Menyepakati komitmen bersama Waktu

Alokasi waktu : 4 JP (180 menit)

## 8. Mata Pelatihan Kerjasama Multipihak dalam Penanggulangan Bencana

### a. Deskripsi Singkat

Materi ini menjelaskan pengelolaan kerja sama efektif antara stakeholder yang ada pada suatu kejadian bencana di sebuah wilayah. Pentingnya kerjasama multi pihak telah ditegaskan dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB) yang sangat menekankan pentingnya kerjasama multi pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 dan 27 bahwa pemerintah merupakan penanggung jawab utama, tetapi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dalam segala aspeknya. UUPB juga menekankan pentingnya peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana. Ketiga pihak ini dilambangkan dalam segitiga pada logo BNPB. Dalam prakteknya, proses mengupayakan kerja sama di antara berbagai pihak dapat menemui sejumlah hambatan. Setiap pihak yang dilibatkan memiliki persepsi sendiri-sendiri, yang mempengaruhi cara pendekatan dan metode yang digunakan dalam isu penanggulangan bencana. Selain itu, setiap pihak dapat saja mengejar kepentingan yang berbeda-beda. Semua ini adalah kenyataan yang tidak terhindarkan. Konflik adalah keniscayaan dan karena itu, harus diterima dan dikelola agar menguatkan, bukan sebaliknya melemahkan, kerjasama di antara para pihak.

### b. Hasil Belajar

Peserta mampu menjelaskan tata cara kerjasama multipihak dalam penanggulangan bencana.

### c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan kerja sama multi pihak dalam penanggulangan bencana.
- 2) Menjelaskan klaster penanggulangan bencana di Indonesia.
- 3) Menjelaskan kerjasama internasional dalam penanggulangan bencana.

d. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

- 1) Kerjasama Multipihak dalam Penanggulangan Bencana
  - Koordinasi pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana
  - Koordinasi antar Lembaga dalam penanggulangan bencana
- 2) Klaster Penanggulangan Bencana
  - Jenis klaster penanggulangan bencana di Indonesia
- 3) Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Bencana
  - Mekanisme penerimaan bantuan penanggulangan bencana internasional
  - Mekanisme pemberian bantuan penanggulangan bencana internasional

e. Waktu

Alokasi waktu : 3 JP (135 menit).

9. Kelompok Mata Pelatihan Tambahan (Opsional)

Mata pelatihan tambahan merupakan sejumlah pengayaan materi yang sifatnya dianjurkan, namun tidak menjadi kewajiban pada sebuah Pelatihan Dasar Manajemen Bencana. Berupa satu materi atau kombinasi sejumlah materi. Jumlah jam pelatihan dirancang dan disesuaikan dengan jenis kebutuhan spesifik peserta pelatihan dengan waktu maksimal selama durasi pelatihan yang telah ditetapkan. Jenis materi bisa berupa namun tidak terbatas pada: sosialisasi sertifikasi penanggulangan bencana, visitasi lapangan, mendirikan tenda darurat, pengelolaan dapur umum lapangan, mitigasi praktis kebencanaan.

(1) Sosialisasi Sertifikasi Penanggulangan Bencana

a. Deskripsi Singkat

Pada materi ini akan dibahas maksud dari sertifikasi profesi, seberapa penting sertifikasi profesi, manfaat mengikuti sertifikasi profesi untuk pengguna maupun manfaat instansi, mekanisme sertifikasi dan konsekuensi *value* diri yang didapatkan dari sertifikasi dan konsekuensi finansial.

b. Hasil Belajar

Peserta mampu menjelaskan sertifikasi profesi penanggulangan bencana.

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan manfaat sertifikasi profesi
- 2) Menjelaskan mekanisme sertifikasi
- 3) Menjelaskan konsekuensi sertifikasi.

d. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

- 1) Manfaat sertifikasi
- 2) Mekanisme sertifikasi
- 3) Konsekuensi sertifikasi

e. Waktu

Alokasi waktu : 2 JP (90 menit).

(2) Visitasi/Keterampilan Praktis Lapangan Penanggulangan Bencana

a. Deskripsi Singkat

Kegiatan materi tambahan lainnya berisi tentang visitasi atau penguatan keterampilan praktis lapangan dalam penanggulangan bencana seperti mendirikan

tenda darurat lapangan, pembekalan dapur umum, dan pemahaman tentang mitigasi praktis. Visitasi dapat dilakukan ke beberapa alternatif lokasi. Pertama, lokasi-lokasi yang pernah terjadi bencana. Kedua, institusi atau lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana, misalnya bidang penanggulangan bencana (BNPB, BPBD, Pusdalops), bidang sosial (Kementerian Sosial, Dinas Sosial), bidang kesehatan (Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan) atau kementerian, lembaga dan SKPD yang relevan dengan penanggulangan bencana. Ketiga, lokasi-lokasi lain yang dijadikan tempat pembelajaran tentang kebencanaan di Indonesia, misalnya universitas, museum atau sejenisnya.

Mendirikan tenda darurat lapangan merupakan jenis keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana pada masa tanggap darurat bencana. Pembekalan dilakukan dengan pengarahan terhadap peserta perihal spesifikasi teknis tenda darurat lapangan yang bisa digunakan dalam praktek. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian peran dan tugas serta praktek langkah-langkah mendirikan tenda darurat lapangan. Tenda yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan spesifikasi peralatan yang ada pada saat pelatihan.

Pembekalan dapur umum lapangan merupakan jenis keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana pada masa tanggap darurat bencana. Pembekalan dilakukan dengan pengarahan terhadap peserta perihal teori situasi dan kondisi kebutuhan permukiman pengungsi dan responder pada saat tanggap darurat bencana, dan proses siklus penyediaan kebutuhan permukiman siap saji setiap hari. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian peran dan tugas serta praktek langkah-langkah menyiapkan unit dapur umum dan bahan-bahan. Dilanjutkan dengan proses memasak dan menyajikan makanan sesuai dengan perhitungan kebutuhan.

b. Hasil Belajar

Peserta mampu menyimulasikan penguatan lapangan dalam penanggulangan bencana

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

1) Melakukan simulasi keterampilan lapangan

d. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1) Teori keterampilan lapangan;

2) Simulasi keterampilan lapangan

e. Waktu

Alokasi waktu : 4 JP (180 menit).

## 10. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

a. Deskripsi Singkat

Rencana tindak lanjut setelah pelatihan dasar manajemen bencana adalah dokumen yang merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh peserta pelatihan setelah menyelesaikan pelatihan dasar manajemen bencana. Rencana ini mencakup implementasi konsep dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan, seperti pemahaman tentang Pra, saat dan pascabencana, Peserta dapat menggunakan rencana tindak lanjut ini untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi nyata, baik di tingkat individu maupun organisasi. Dengan adanya rencana tindak lanjut, peserta pelatihan dapat memaksimalkan manfaat dari pelatihan dasar manajemen bencana dan berkontribusi secara lebih efektif. Setelah kurun waktu minimal 6 bulan pasca pelatihan, beberapa peserta akan dimintai laporan secara khusus terkait laporan pelaksanaan kegiatan pasca pelatihan sekaligus menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi.

- b. Hasil Belajar  
Peserta mampu menyusun perencanaan kegiatan tindak lanjut pasca pelatihan di lingkungan kerjanya masing-masing
- c. Indikator hasil belajar  
Peserta dapat :
  - (1) Menyusun perencanaan kegiatan tindak lanjut pasca kegiatan pelatihan
- d. Materi pokok dan sub materi pokok
  - (1) Perencanaan kegiatan tindak lanjut pasca kegiatan pelatihan
- e. Waktu  
Alokasi waktu 2 JP (90 menit)

### **C. Metode Pembelajaran**

Dalam struktur kurikulum ini pelatihan dasar manajemen bencana metode pembelajaran dilakukan dengan melakukan ceramah, diskusi kelompok, curah pendapat dan juga melibatkan berbagai permainan (games) dipandu dan difasilitasi oleh tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dibidangnya.



## BAB III

### MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

#### A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelatihan Dasar Manajemen Bencana berbasis kompetensi meliputi :

1. Perencanaan pelatihan yang berisi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, serta
2. Mekanisme penyelenggaraan terdiri dari karakteristik calon peserta pendidikan dan pelatihan, karakteristik tenaga pendidik, karakteristik penyelenggara, metode penyelenggaraan, kelengkapan pendidikan dan pelatihan, metodologi pendekatan konsep pelatihan partisipatif dan pengelolaan pelatihan.

#### B. Perencanaan

Mekanisme perencanaan pelatihan meliputi :

##### 1. Persiapan

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap persiapan pelatihan :

- a. Membentuk tim pelatihan;
- b. Menyiapkan kelengkapan administratif;
- c. Menyiapkan rapat teknis internal tim pelaksana (perlu melibatkan Pusdiklat PB bagi lembaga penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi);
- d. Menyiapkan rapat persiapan pelatihan;
- e. Melaksanakan rapat persiapan pelatihan;
- f. Menyusun surat undangan, daftar persyaratan serta lembar konfirmasi dan mendistribusikan kepada peserta;
- g. Menyusun daftar nominasi peserta berdasarkan lembar konfirmasi yang telah dikembalikan kepada panitia;
- h. Seleksi peserta;
- i. Menentukan peserta pelatihan minimal 40 orang dan minimal 30 orang (merekendasikan keterwakilan gender dan atau kelompok inklusi difabel) yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepesertaan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan; dan
- j. Memastikan kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelatihan.

##### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan terdiri dari :

- a. Pembukaan;
- b. Pelaksanaan *pre-test* oleh tim money;
- c. Pelaksanaan pembelajaran;
- d. Pelaksanaan *post test* dan rencana tindak lanjut oleh tim money;
- e. Penutupan.

##### 3. Evaluasi

Jenis evaluasi dalam pelatihan dasar manajemen bencana meliputi :

###### a. Evaluasi Peserta

Penilaian yang dilakukan oleh evaluator terhadap peserta pelatihan pada aspek sikap dan perilaku, pengetahuan dan ketrampilan melalui pengamatan secara langsung maupun tidak langsung, serta penilaian terhadap penugasan-penugasan peserta pelatihan yang diberikan oleh Narasumber/Widyaiswara, penyelenggara, maupun evaluator.

Kelulusan peserta dilakukan melalui penilaian terhadap nilai ujian akhir (atau: *post test*), pengetahuan dan ketrampilan/penugasan dari peserta pelatihan, dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- Nilai Ujian Akhir (40%)
- Sikap (10%)
- Keterampilan / penugasan (50%)

Adapun kualifikasi kelulusan peserta ditetapkan sebagai berikut:

- Lulus Memuaskan (Skor : 90,00 - 100);
- Lulus Baik Sekali (Skor : 80,00– 90,0);
- Lulus Baik (Skor : 70,0 – 80,0);
- Tidak Lulus (Skor : Dibawah 70,0)

b. Evaluasi Tenaga Pengajar

Evaluasi terhadap tenaga pendidik/Widyaiswara dilakukan oleh evaluator melalui peserta pelatihan terhadap mata pelatihan yang diajarkan. Evaluator menyiapkan instrumen evaluasi yang dihimpun pada akhir sesi materi. Selanjutnya evaluator menganalisis hasil data serta memberikan rekomendasi kepada pimpinan.

c. Evaluasi Penyelenggaraan

Penilaian peserta pelatihan terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan secara harian maupun pada akhir pelatihan melalui instrumen evaluasi yang disiapkan oleh evaluator sebagai perbaikan mutu pelatihan pada sisa waktu yang ada dan pada pelatihan mendatang.

Uraian lengkap terkait mekanisme perencanaan lebih lanjut dijelaskan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana.

### C. Mekanisme Penyelenggaraan

1. Karakteristik Calon Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan Dasar Manajemen Bencana berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) khususnya yang bergerak dalam bidang kebencanaan, atau pegiat kebencanaan di bidang kebencanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Persyaratan umum peserta yang ditentukan untuk dapat mengikuti pelatihan Dasar Manajemen Bencana adalah sebagai berikut:

- a) Minimal Berpendidikan SMA atau Sederajat;
- b) Lebih diutamakan bagi anggota organisasi dan mendapatkan penugasan oleh Pimpinan/Lembaga/Organisasi Terkait;
- c) Peserta diharapkan membawa kartu BPJS atau kartu asuransi kesehatan (jika pelatihan dilakukan Klasikal);
- d) Belum pernah dinyatakan lulus Pelatihan Dasar Manajemen Bencana
- e) Bersedia dan berkomitmen mengikuti seluruh proses kegiatan Pelatihan dibuktikan dengan mengisi dan menandatangani lembar komitmen untuk mengikuti pelatihan;
- f) Harus memiliki peralatan (sumber daya) untuk mengakses materi pembelajaran jarak jauh (bagi pelatihan dengan metode *online*).

2. Karakteristik Tenaga Pengajar

a) Tenaga pengajar terdiri dari widyaiswara, unsur pakar, praktisi, akademisi dan tenaga lainnya yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan yang memiliki keahlian dan atau berpengalaman dibidang Dasar Manajemen Bencana. Adapun kriteria Tenaga Pengajar adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan minimal S2
- 2) Telah mengikuti pelatihan dasar penanggulangan bencana.
- 3) Telah mengikuti pelatihan untuk pelatih (TOT) di bidang penanggulangan bencana dan Dasar Manajemen Bencana atau mempunyai pengalaman mengajar di bidang kebencanaan dan atau yang berpengalaman di bidangnya.

Adapun tugas tenaga pengajar antara lain :

- 1) menyusun bahan perencanaan pelatihan (bahan tayang, RBPMP)
- 2) menyusun soal materi pelatihan sebagai penugasan materi
- 3) melakukan kegiatan pembelajaran
- 4) memberikan penilaian peserta atas partisipasi dan tugas
- 5) membuat dan memeriksa hasil pretest dan posttest
- 6) mengembangkan media dan materi pembelajaran

b) Tenaga Pendamping

Tenaga pendamping merupakan tenaga pengajar yang memberikan wawasan atau materi berkaitan dengan materi dalam kegiatan optional seperti *field visit*, praktek lapangan, mitigasi praktis dan muatan lokal. Adapun syarat sebagai tenaga pendamping yaitu:

- 1) Pendidikan minimal S1
- 2) Memiliki kompetensi sesuai bidang materi yang diampu, dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman minimal 2 tahun dengan melampirkan daftar riwayat hidup dan portofolio.

3. Karakteristik Penyelenggara

Penyelenggaraan pelatihan dasar manajemen bencana meliputi 2 mekanisme proses penyelenggaraan diantaranya :

a) Penyelenggaraan oleh Pusdiklat PB

Penyelenggaraan pelatihan di tingkat Pusat dilaksanakan oleh unit subnansi yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB).

b) Penyelenggaraan oleh Pola Kerja Sama

Penyelenggaraan pelatihan dasar manajemen bencana dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan atau swasta serta organisasi profesi bidang penanggulangan bencana, untuk bekerjasama dengan Pusdiklat PB dalam menyelenggarakan Pelatihan. Dalam hal ini lembaga pemerintah maupun swasta dan/atau organisasi profesi penanggulangan bencana mengajukan surat permohonan kerja sama penyelenggaraan pelatihan kepada Pusdiklat PB yang berisi nama pelatihan, waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan, sumber anggaran serta dilampirkan daftar riwayat hidup calon peserta, dan calon pengajar serta tenaga kediklatan lainnya.

Berdasarkan permohonan kerjasama tersebut, dibuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar Pusdiklat PB dengan penyelenggara dan/atau lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta dan/atau organisasi profesi bidang penanggulangan bencana. Penyelenggara pelatihan terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan pelaksana di lembaga penyelenggara pelatihan yang bertugas sebagai penyelia, penanggung jawab pelaksana, petugas administrasi keuangan, dan pendukung teknologi informasi.

4. Model Penyelenggaraan

Model penyelenggaraan pelatihan dasar manajemen bencana menggunakan kegiatan pembelajaran tatap muka (klasikal) dan *online*. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, presentasi, diskusi, permainan, penugasan dan lain-lain. Pendekatan dalam penyampaian materi menggunakan pendekatan andragogi (pembelajaran bagi orang dewasa).

5. Kelengkapan Pelatihan

Komponen fasilitas pelatihan meliputi kepemilikan dan/atau ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2. Sarana dan Prasarana**

Jenis Sarana Prasarana	Metode	
	Klasikal	E-Learning
<b>A. Sarana</b>		
Papan tulis/ <i>white board</i>	√	-
Flip chart	√	-
Sound system	√	-
Audio visual aids	√	√
Handphone	√	√
Set Meja-Kursi	√	
Laptop	√	√
Video	√	√
Perekam	√	√
LCD Projector	√	-
Jaringan Wireless fidelity (Wifi)	√	√
Buku referensi	√	√
Modul/Bahan Ajar	√	√
Bank Kasus	√	√
Teknologi Informasi Learning Management System (LMS) secara mandiri atau memanfaatkan aplikasi lain yang sudah tersedia dimasing-masing daerah	-	√
Handsanitizer	√	-
Disinfektan	√	-
Masker	√	-
Thermal Gun	√	-
Tempat Pencuci Tangan	√	-
<b>B. Prasarana</b>		
Ruang kelas	√	-
Ruang diskusi	√	-
Ruang fasilitator	√	-
Perpustakaan (dapat disesuaikan)	√	-
Ruang makan	√	-
Unit Kesehatan	√	-

Jenis Sarana Prasarana	Metode	
	Klasikal	E-Learning
Tempat ibadah	√	-
Ruang Isolasi/Karantina	√	-
Rumah sakit rujukan (bila ada peserta berindikasi sakit)	√	-
Rumah masing-masing	-	√
Jaringan dan akses internet	√	√

## 6. Metodologi Pendekatan Konsep Pelatihan Partisipatif

Pelatihan partisipatif untuk mengembangkan kapasitas peserta dan berbagi pengalaman dan pembelajaran. Fasilitator mendorong dan mengkondisikan peserta untuk saling belajar sesama peserta, bukan hanya dari narasumber atau fasilitator, melalui pelatihan partisipatif. Karakteristik belajar orang dewasa:

- a) Sudah berpengalaman sehingga dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama peserta.
- b) Belajar bukan untuk belajar saja, melainkan untuk diterapkan.
- c) Tidak suka digurui, namun juga membutuhkan informasi baru bermanfaat.
- d) Tidak memiliki keterbatasan secara fisik dan mental. Misal: menggunakan kacamata baca, kapasitas waktu belajar efektif menurun.
- e) Mengembangkan proses pembelajaran dari pengalaman dan menghubungkan teori dengan kehidupan nyata.
- f) Memberikan informasi yang dibutuhkan peserta.
- g) Mempertimbangkan keterbatasan fisik dan psikis peserta orang dewasa.

Proses yang paling penting adalah mengolah pengalaman menjadi pembelajaran bersama. Agar pengalaman dapat menghasilkan pengetahuan, tenaga pendidik secara taat azas harus memproses pelajaran mengikuti alur belajar yang terdiri dari empat tahap aktivitas yakni:

- a) Melakukan kegiatan
- b) Mengumpulkan informasi didasarkan pada pemahaman peserta atas kegiatan tersebut
- c) Melakukan analisis data tersebut
- d) Menyimpulkan

Tim pengajar bekerja sama mengelola sebuah pelatihan secara penuh waktu (*full time*) mengingat dengan konsep POD, setiap topik belajar merupakan kesinambungan dari topik belajar sebelum dan sesudahnya. Pembelajaran merupakan proses akumulasi yang dijalankan oleh narasumber per-sesi seperti seminar.

## 7. Pengelolaan Pelatihan

Pengelolaan pelatihan dasar manajemen bencana berbasis kompetensi meliputi berbagai aspek yang harus disiapkan dalam mendukung pelatihan diantara:

- a) Pengelolaan pelatihan/program pelatihan dasar manajemen bencana dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan yang terakreditasi
- b) Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan mengakreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan PB adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

- c) Penyiapan pengelolaan pelatihan diselenggarakan berdasarkan rencana kebutuhan nyata dalam rangka peningkatan kinerja instansi/unit kerja instansi yang bersangkutan baik di bidang teknis substantif maupun bidang teknis administratif
- d) Pengelolaan pelatihan penyusunan dasar manajemen bencana secara klasikal atau non klasikal.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian kurikulum Pelatihan Dasar Manajemen Bencana ini disusun dengan berbasis kompetensi. Penyusun berharap agar kurikulum pelatihan ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan dimaksud.

## LAMPIRAN 1

### RANCANG BANGUN PROGRAM PELATIHAN (RBPP) PELATIHAN DASAR MANAJEMEN BENCANA

1. Program Pelatihan : Pelatihan Dasar Manajemen Bencana
2. Alokasi Waktu : 43 JP @ 45 Menit
3. Deskripsi Program : Pelatihan dasar manajemen bencana memberikan pemahaman yang utuh bagi para peserta pelatihan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia yang berisikan pemahaman mendasar mengenai kebencanaan dan dasar-dasar penanggulangan bencana termasuk di dalamnya membahas mengenai manajemen penanggulangan bencana sesuai dengan SKKNI kode unit: O.842340.001.01 yaitu Melakukan Kerja Efektif pada Sektor Penanggulangan Bencana
4. Tujuan Program
  - a. Kompetensi Dasar : Pada akhir pelatihan peserta mampu menjelaskan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana sesuai SKKNI kode unit: O.842340.001.01 yaitu melakukan kerja efektif pada sektor Penanggulangan Bencana

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	MEDIA	ESTIMASI WAKTU	REFERENSI
1.	Peserta dapat menjelaskan dinamika kelompok	Dinamika Kelompok	1. Dinamika Kelompok	a. Pengertian dinamika kelompok b. Proses pembelajaran dinamika kelompok c. Mengenal diri sendiri dan anggota kelompok d. Pembentukan kelompok	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ceramah</li><li>• Diskusi kelompok</li><li>• Curah pendapat</li><li>• Games</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Video</li><li>• <i>Power point</i></li></ul>	4 JP	

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	MEDIA	ESTIMASI WAKTU	REFERENSI
			2. Kerjasama tim yang efektif	a. Membangun kerjasama tim b. membangun komunikasi yang efektif c. Menyepakati komitmen bersama				
2.	Peserta dapat menjelaskan konsep, jenis dan karakteristik bencana dengan benar	Kebencanaan	1. Konsep Bencana	a. Definisi Bencana b. Pandangan terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi kelompok</li> <li>• Tugas pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video</li> <li>• <i>Power point</i></li> </ul>	3 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU no 24 tahun 2007</li> </ul>
		2. Jenis Bencana	Jenis bencana					
		3. Karakteristik bencana	Karakteristik bencana					
3.	Peserta dapat menjelaskan konsep, sistem PB beserta prinsip dan etika dalam penanggulangan bencana	Dasar dan Sistem Penanggulangan bencana	1. Konsep dan Sistem PB	a. Konsep PB b. Kerangka Sistem PB <ul style="list-style-type: none"> <li>• legislasi</li> <li>• kelembagaan</li> <li>• perencanaan PB</li> <li>• pendanaan</li> <li>• peningkatan kapasitas</li> <li>• penyelenggaraan PB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi kelompok</li> <li>• Tugas pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video</li> <li>• Gambar</li> <li>• <i>Power point</i></li> </ul>	6 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpers No 75 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana bersama,</li> <li>• Tata Kelola Keuangan Daerah</li> </ul>

Lampiran 1. Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	MEDIA	ESTIMASI WAKTU	REFERENSI
			2. Praktik baik ( <i>best practice</i> ) Penanggulan gan bencana	a. Praktik baik (best practice) penanggulangan bencana				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen dagri No 70 tahun 2019 tentang system informasi pemerintah daerah</li> </ul>
			3. Prinsip dan etika PB	a. Prinsip PB nasional b. Prinsip PB internasional <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prinsip dasar kemanusiaan</li> <li>- Perlindungan kelompok rentan</li> <li>- Pengarusutamaan gender</li> <li>- Kearifan lokal</li> </ul> c. Etika PB				
4.	Peserta dapat menjelaskan manajemen bencana	Manajemen bencana	1. Manajemen PraBencana	a. Manajemen Risiko Bencana b. Pengkajian Risiko Bencana c. Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi kelompok</li> <li>• Curah pendapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video</li> <li>• Gambar</li> <li>• <i>Power point</i></li> </ul>	12 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB</li> <li>• Perpres Tahun 2018 tentang</li> </ul>
			2. Manajemen Penanganan	a. Pengertian Penanganan Darurat bencana				

Lampiran 1. Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	MEDIA	ESTIMASI WAKTU	REFERENSI
			Darurat Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Upaya Penanganan Darurat</li> <li>c. Mekanisme Penyelenggaraan penanganan Darurat</li> <li>d. Pembiayaan Penanganan Darurat</li> <li>e. Dukungan Psikososial</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>status penetapan darurat</li> <li>• Perka No 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana</li> <li>• Perban Nomor 6 tahun 2008 tentang penggunaan dana siap pakai</li> <li>• Perban BNPB No 5 dan 6 tahun 2017 tentang Jitupasna</li> </ul>
			3. Manajemen Pemulihan Bencana (Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsep Pemulihan (kebijakan RR)</li> <li>b. Perencanaan Pemulihan</li> <li>c. Aktivitas Pemulihan Pasca Bencana</li> <li>d. Pendanaan pasca bencana</li> </ul>				
5.	Peserta dapat menjelaskan manajemen data, informasi dan komunikasi bencana	Manajemen data, informasi dan komunikasi bencana	1. Data & informasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian data dan informasi bencana</li> <li>b. Jenis data dan informasi bencana</li> <li>c. Pengelolaan sistem informasi (satu data bencana)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi kelompok</li> <li>• Curah pendapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video</li> <li>• Gambar</li> <li>• <i>Power point</i></li> </ul>	3 JP	Perban No 1 tahun 2023 tentang Satu Data Bencana

Lampiran 1. Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	MEDIA	ESTIMASI WAKTU	REFERENSI
			2. teknologi informasi bencana	a. Teknologi informasi bencana b. Sistem komunikasi radio				
			3. Komunikasi bencana	a. pengertian komunikasi b. Komunikasi bencana				
6	Peserta dapat menjelaskan logistic dan peralatan penanggulangan bencana	manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana	1. Sistem manajemen logistik dan peralatan	a. Definisi manajemen logistik dan peralatan b. Prinsip manajemen logpal c. Tahapan manajemen logistik dan peralatan d. Jenis logistik dan peralatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi kelompok</li> <li>• Curah pendapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video</li> <li>• Gambar</li> <li>• Power point</li> </ul>	3 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perban 4 tahun 2018 tentang sistem manajemen logistik dan peralatan PB</li> </ul>
			2. Klaster logistik	a. Definisi klaster logistik b. Pembentukan / Struktur organisasi klaster c. Tahapan penyelenggaraan klaster logistik pra, saat sampai pasca				

Lampiran 1. Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA PELATIHAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	MEDIA	ESTIMASI WAKTU	REFERENSI
7	Peserta dapat menjelaskan tata cara kerjasama multipihak dalam penanggulangan bencana sesuai aturan yang berlaku	Kerjasama multipihak	1. Kerjasama multipihak dalam PB	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi pusat dan daerah dalam PB</li> <li>b. Koordinasi antar Lembaga dalam PB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video</li> <li>• Gambar</li> <li>• <i>Power point</i></li> </ul>	3 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 173 tahun 2014 tentang klaster Nasional PB</li> <li>• Permensos No 25 tahun 2015 tentang klaster pengungsian</li> <li>• Permenkes No 175 Tahun 2015 tentang klaster kesehatan,</li> <li>• Perban 6 tahun 2022 tentang logpal</li> <li>• Permendikbud tentang SPAB</li> </ul>
2. Klaster penanggulangan bencana			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Klaster PB di Indonesia</li> <li>b. Jenis klaster PB di Indonesia</li> </ul>					
3. Kerjasama internasional dalam PB			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mekanisme penerimaan bantuan PB internasional</li> <li>b. Mekanisme pemberian bantuan PB internasional</li> </ul>					

Lampiran 1. Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP)

**LAMPIRAN 2 :****RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN**

Nama Pelatihan : Pelatihan Dasar Manajemen Bencana  
 Mata Pelatihan : Dinamika Kelompok  
 Alokasi Waktu : 4JP @ 45 Menit

Deskripsi Singkat : Materi ini memberikan pengalaman kepada peserta untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan peserta lain sebagai sebuah tim. Kemudian, mereka diarahkan untuk saling mengenal dan membuat peserta merasa dirinya siap dan nyaman dengan suasana pelatihan melalui permainan. Selanjutnya dijelaskan tujuan, pendekatan, dan struktur pelatihan sehingga peserta memahami gambaran besar pelatihan ini. Aktivitas selanjutnya adalah memetakan harapan, kekuatiran, dan kontribusi fasilitator dan peserta. Setelah itu peserta diajak membuat kesepakatan-kesepakatan untuk membentuk komitmen bersama dalam perilaku konsisten yang mendukung keberhasilan pelatihan.

## Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan dinamika kelompok
2. Indikator Hasil Belajar : Peserta dapat :
  - 1) Menjelaskan dinamika kelompok
  - 2) Membangun kerjasama tim yang efektif

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
1	Melakukan perkenalan	Dinamika kelompok	a. Pengertian dinamika kelompok b. Proses pembelajaran dinamika kelompok c. Mengenal diri sendiri dan anggota kelompok d. Pembentukan kelompok	a. Ceramah b. Curah pendapat c. Curah gagasan d. Diskusi e. Studi kasus f. Games	1) <i>Projector</i> 2) <i>Slide</i> 3) <i>Laser point</i> 4) <i>Flipchart</i> 5) <i>Spidol</i> 6) <i>Kertas metaplan</i>	4 JP	Test non objective: uraian singkat lisan ataupun tulisan	



NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
2	Melakukan kerjasama dengan peserta lain dalam tim	Kerjasama tim yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun kerjasama tim</li> <li>b. membangun komunikasi yang efektif</li> <li>c. Menyepakati komitmen bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. <i>Online Zoom</i></li> <li>h. LMS</li> </ul>				

## RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN

- Nama Pelatihan : Pelatihan Dasar Manajemen Bencana  
 Mata Pelatihan : Kebencanaan  
 Alokasi Waktu : 3JP @ 45 Menit
- Deskripsi Singkat : Materi ini memberikan pemahaman konsep, jenis, dan karakteristik bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jika kita mencermati, maka kita mendapati tiga komponen dalam pengertian-pengertian di atas, yaitu bencana, kejadian mengancam (bisa alam maupun non alam), dan faktor manusia. Implikasinya adalah bencana dan kejadian ancaman (selanjutnya disebut ancaman) merupakan dua hal yang berbeda, ancaman dapat menjadi bencana apabila manusia dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kemampuan menghadapi ancaman atau kerentanan terhadap bencana. Setiap jenis bencana mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan masalah yang diakibatkannya dimana penetapannya ditentukan oleh komponen penyebab bencana itu sendiri dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Secara keseluruhan karakteristik bencana di Indonesia dipengaruhi oleh posisi geologis, posisi astronomis, dan perilaku manusianya yang menghasilkan berbagai bencana, yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin badai, gelombang badai/pasang, gempa bumi, letusan gunung api, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit.
- Tujuan Pembelajaran
1. Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan konsep, jenis dan karakteristik bencana dengan benar
2. Indikator Hasil Belajar : Peserta dapat :
- Menjelaskan konsep bencana
  - Membedakan jenis bencana
  - Menjelaskan karakteristik bencana

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
1	Menjelaskan konsep bencana	Konsep bencana	1. Definisi Bencana 2. Pandangan terhadap bencana	1. Ceramah 2. Curah pendapat 3. Curah gagasan	1. <i>Projector</i> 2. <i>Slide</i> 3. <i>Laser point</i> 4. <i>Flipchart</i> 5. Spidol	3 JP	Test non objective: uraian singkat lisan maupun tulisan	UU no. 24 tahun 2007
2	Membedakan jenis bencana	Jenis bencana	Jenis-jenis bencana					

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
3	Menjelaskan karakteristik bencana	Karakteristik bencana	Karakteristik bencana	4. Diskusi 5. Studi kasus 6. Games 7. <i>Blended Learning</i> 8. <i>Online Zoom</i> 9. LMS	6. Kertas metaplan			

## RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN

- Nama Pelatihan : Pelatihan Dasar Manajemen Bencana  
Mata Pelatihan : Dasar dan Sistem Penanggulangan Bencana  
Alokasi Waktu : 6 JP @ 45 Menit  
Deskripsi Singkat : Materi ini menjelaskan prinsip-prinsip, dan sistem penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanganan bencana sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan, pengurangan (mitigasi), kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Tujuan penanggulangan bencana untuk melindungi masyarakat dari bencana dan melindungi dari dampak yang ditimbulkannya. Penanggulangan Bencana menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; nondiskriminatif; dan nonproletisi, beserta penjelasan berbagai prinsip penanggulangan bencana dalam ranah internasional beserta etika yang wajib diikuti dalam penanggulangan bencana. Sistem penanggulangan bencana adalah sistem pengaturan yang menyeluruh tentang kelembagaan, penyelenggaraan, tata kerja dan mekanisme serta pendanaan dalam PB. Sistem ini ditetapkan dalam pedoman/panduan atau peraturan dan perundang-undangan. Di Indonesia sistem PB didasarkan pada kelembagaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sistem Nasional PB berupaya untuk menuju penanggulangan bencana yang tepat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut telah terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaan bencana dari tingkat nasional hingga daerah, diantaranya dalam hal hukum, peraturan dan perundangan, kelembagaan, perencanaan, penyelenggaraan PB, pengelolaan sumber daya, pendanaan dan etika bagaimana kita menghadapi bencana.
- Tujuan Pembelajaran
- a. Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan konsep, sistem dan praktik baik beserta prinsip dan etika dalam penanggulangan bencana
- b. Indikator Hasil Belajar : Peserta dapat :
- 1) Menjelaskan konsep dan sistem penanggulangan bencana.
  - 2) Pengalaman baik (*best practice*) penanggulangan bencana
  - 3) Menjelaskan prinsip dan etika penanggulangan bencana.

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
1	Menjelaskan konsep dan sistem penanggulangan bencana.	Konsep dan Sistem PB	1. Konsep PB 2. Kerangka Sistem PB • Legislasi • Kelembagaan	1. Ceramah 2. Curah pendapat	1. <i>Projector</i> 2. <i>Slide</i> 3. <i>Laser point</i>	6JP	Test non objective: uraian singkat lisan	• Perpers No 75 Tahun 2021 tentang

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan PB</li> <li>• Pendanaan</li> <li>• Peningkatan kapasitas</li> </ul> 3. Penyelenggaraan PB	3. Curah gagasan 4. Diskusi 5. Studi kasus 6. Games 7. <i>Blended Learning</i> 8. <i>Online Zoom</i> 9. LMS	4. <i>Flipchart</i> 5. Spidol 6. Kertas metaplan		maupun tulisan	pengelolaan dana bersama, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Kelola Keuangan Daerah</li> <li>• Permen dagri No 70 tahun 2019 tentang system informasi pemerintah daerah</li> </ul>
2	Menjelaskan praktik baik penanggulangan bencana	Praktik baik PB	Praktik baik Penanggulangan Bencana ( <i>best practice</i> )					
3	Menjelaskan prinsip dan etika penanggulangan bencana.	Prinsip dan etika PB	a. Prinsip PB nasional b. Prinsip PB internasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip dasar kemanusiaan</li> <li>• Perlindungan kelompok rentan</li> <li>• Pengarusutamaan gender</li> <li>• Kearifan lokal</li> </ul> c. Etika PB					

## RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN

Nama Pelatihan : Pelatihan Dasar Manajemen Bencana  
 Mata Pelatihan : Manajemen Bencana  
 Alokasi Waktu : 12 JP @ 45 Menit

Deskripsi Singkat : Materi ini menjelaskan fase bencana dan ruang lingkupnya dalam manajemen efektif penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap, dan pascabencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana. Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

**Tujuan Pembelajaran**

1. Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan manajemen bencana
2. Indikator Hasil Belajar : Peserta dapat :
  - 1) Menjelaskan manajemen pra bencana.
  - 2) Menjelaskan manajemen penanganan darurat bencana.
  - 3) Menjelaskan manajemen pemulihan bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana).

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
1	Menjelaskan manajemen pra bencana.	Manajemen PraBencana	a.Manajemen Risiko Bencana b.Pengkajian Risiko Bencana c.Kesiapsiagaan	1. Ceramah 2. Curah pendapat 3. Curah gagasan 4. Diskusi 5. Studi kasus 6. Games	1. <i>Projector</i> 2. <i>Slide</i> 3. <i>Laser point</i> 4. <i>Flipchart</i> 5. Spidol 6. Kertas metaplan	12 JP	Test non objective: uraian singkat lisan maupun tulisan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No 21 tentang penyelenggaraan PB</li> <li>• Perpres Tahun 2018 tentang status penetapan darurat</li> </ul>
2	Menjelaskan manajemen penanganan darurat	Manajemen Penanganan Darurat	a. Pengertian Penanganan					

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
	bencana.	Bencana	Darurat bencana b. Upaya Penanganan Darurat c. Mekanisme Penyelenggaraan penanganan Darurat d. Pembiayaan Penanganan Darurat e. Dukungan Psikososial	7. <i>Blended Learning</i> 8. <i>Online Zoom</i> 9. LMS				<ul style="list-style-type: none"> <li>Perka No 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana</li> <li>Perban Nomor 6 tahun 2008 tentang penggunaan dana siap pakai</li> <li>Perban BNPB No 5 dan 6 tahun 2017 tentang Jitupasna</li> </ul>
3	Menjelaskan manajemen pemulihan bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana).	Manajemen Pemulihan Bencana (Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana)	a. Konsep Pemulihan (kebijakan RR) b. Perencanaan Pemulihan c. Aktivitas Pemulihan Pasca Bencana d. Pendanaan pasca bencana					

## RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN

- Nama Pelatihan : Pelatihan Dasar Manajemen Bencana
- Mata Pelatihan : Manajemen Data, Informasi dan Komunikasi Bencana
- Alokasi Waktu : 3 JP @ 45 Menit
- Deskripsi Singkat : Materi ini menjelaskan manajemen efektif data, informasi, dan komunikasi dalam penanggulangan bencana. Data adalah segala sesuatu hal yang menjadi sumber yang dikelola menjadi informasi. Sistem informasi bencana adalah suatu kumpulan modul atau komponen mengenai kejadian-kejadian bencana mulai dari pengumpulan, pengelolaan, proses, penyimpanan, analisa, dan pendistribusian informasi mengenai bencana. Peran informasi dan komunikasi adalah tersedia informasi penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan akurat sebagai kebutuhan untuk menganalisis upaya penanggulangan bencana. Tersedianya informasi pada tahap prabencana, tanggap, dan pascabencana. Sedangkan komunikasi bencana merupakan suatu proses penyampaian pesan mengenai bencana dari satu pihak kepada pihak lain baik dilakukan secara verbal maupun nonverbal.
- Ada dua aspek terpenting dalam komunikasi, adalah informasi dan komunikasi. Gangguan terhadap fungsi infrastruktur informasi dan komunikasi, ketidakjelasan mekanisme hingga informasi yang simpang siur menyulitkan upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh banyak pihak, terutama bagi para penyintas. Untuk memperbaiki infrastruktur informasi dan komunikasi di lokasi bencana tentu membutuhkan waktu yang relatif lama jika menggunakan cara biasa. Karena itu, dirumuskan dan diterapkan alternatif-alternatif infrastruktur komunikasi yang efektif terutama dalam masa tanggap darurat bencana.
- Tujuan Pembelajaran
1. Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan manajemen data, informasi dan komunikasi bencana dengan baik.
  2. Indikator Hasil Belajar : Peserta dapat :
    - 1) Menjelaskan data & informasi bencana
    - 2) Menjelaskan teknologi informasi bencana
    - 3) Menjelaskan komunikasi bencana.

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
1	Menjelaskan data dan informasi bencana	Data & informasi bencana	a. Pengertian data dan informasi bencana b. Jenis data dan informasi bencana	1. Ceramah 2. Curah pendapat 3. Curah gagasan	1. <i>Projector</i> 2. <i>Slide</i> 3. <i>Laser point</i> 4. <i>Flipchart</i> 5. Spidol	3 JP	Test non objective: uraian singkat lisan maupun tulisan	Perban No 1 tahun 2023 tentang Satu Data Bencana



NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
			c. Pengelolaan sistem informasi (satu data bencana)	4. Diskusi 5. Studi kasus 6. Games 7. <i>Blended Learning</i> 8. <i>Online Zoom</i> 9. LMS	6. Kertas metaplan			
2	Menjelaskan teknologi informasi bencana	teknologi informasi bencana	a. teknologi informasi bencana b. teknologi komunikasi radio					
3	Menjelaskan komunikasi bencana	Komunikasi bencana	a. pengertian komunikasi b. Komunikasi kebencanaan					

## RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN

- Nama Pelatihan : Pelatihan Dasar Manajemen Bencana  
 Mata Pelatihan : Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana  
 Alokasi Waktu : 3 JP @ 45 Menit  
 Deskripsi Singkat : ateri ini menjelaskan manajemen efektif logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana. Amanah dari Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa BNPB mempunyai tugas membangun sistem manajemen logistik dan peralatan. Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat tanggap darurat bencana dan pada pasca bencana. Faktor utama yang dapat mendukung berjalannya sistem logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana adalah: kemampuan infrastruktur, ketersediaan dan jumlah alat transportasi penanggulangan bencana baik secara nasional, regional, lokal maupun setempat.
- Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi. Sumber logistik bersumber dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Jenis logistik, meliputi logistik kemanusiaan, militer, dan komersial. Logistik kemanusiaan untuk menyelamatkan penyintas dan harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan, efisien dan hemat biaya. Sedangkan, peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
- Tujuan Pembelajaran
1. Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana dengan baik.
  2. Indikator Hasil Belajar : Peserta dapat :
    - 1) Menjelaskan sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana
    - 2) Menjelaskan kluster logistik penanggulangan bencana.

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
1	Menjelaskan sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Sistem manajemen logistik dan peralatan	a. Definisi manajemen logistik dan peralatan	1. Ceramah 2. Curah pendapat	1. <i>Projector</i> 2. <i>Slide</i> 3. <i>Laser point</i>	3 JP	Test non objective: uraian singkat lisan maupun	Perban 4 tahun 2018 tentang sistem manajemen

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Prinsip manajemen logpal</li> <li>c. Tahapan manajemen logistik dan peralatan</li> <li>d. Jenis logistik dan peralatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Curah gagasan</li> <li>4. Diskusi</li> <li>5. Studi kasus</li> <li>6. Games</li> <li>7. <i>Blended Learning</i></li> <li>8. <i>Online Zoom</i></li> <li>9. LMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. <i>Flipchart</i></li> <li>5. Spidol</li> <li>6. Kertas metaplan</li> </ul>		tulisan	logistik dan peralatan PB
2	Menjelaskan klaster logistik penanggulangan bencana	Klaster logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Definisi klaster logistik</li> <li>b. Pembentukan / Struktur organisasi klaster</li> <li>c. Tahapan penyelenggaraan klaster logistik pra, saat sampai pasca</li> </ul>					

## RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN

Nama Pelatihan : Pelatihan Dasar Manajemen Bencana  
 Mata Pelatihan : Kerjasama Multipihak dalam Penanggulangan Bencana  
 Alokasi Waktu : 3 JP @ 45 Menit  
 Deskripsi Singkat : Materi ini menjelaskan pengelolaan kerja sama efektif antara stakeholder yang ada pada suatu kejadian bencana di sebuah wilayah. Pentingnya kerjasama multi pihak telah ditegaskan dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB) yang sangat menekankan pentingnya kerjasama multi pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 dan 27 bahwa pemerintah merupakan penanggung jawab utama, tetapi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dalam segala aspeknya. UUPB juga menekankan pentingnya peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana. Ketiga pihak ini dilambangkan dalam segitiga pada logo BNPB. Dalam prakteknya, proses mengupayakan kerja sama di antara berbagai pihak dapat menemui sejumlah hambatan. Setiap pihak yang dilibatkan memiliki persepsi sendiri-sendiri, yang mempengaruhi cara pendekatan dan metode yang digunakan dalam isu penanggulangan bencana. Selain itu, setiap pihak dapat saja mengejar kepentingan yang berbeda-beda. Semua ini adalah kenyataan yang tidak terhindarkan. Konflik adalah keniscayaan dan karena itu, harus diterima dan dikelola agar menguatkan, bukan sebaliknya melemahkan, kerjasama di antara para pihak.

### Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan tata cara Kerjasama multipihak dalam penanggulangan bencana sesuai aturan yang berlaku
2. Indikator Hasil Belajar : Peserta dapat :
  - 1) Menjelaskan kerja sama multi pihak dalam penanggulangan bencana.
  - 2) Menjelaskan klaster penanggulangan bencana di Indonesia.
  - 3) Menjelaskan kerjasama internasional dalam PB.

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
1	Menjelaskan kerja sama multi pihak dalam penanggulangan bencana.	Kerjasama multipihak dalam PB	a. Koordinasi pusat dan daerah dalam PB b. Koordinasi antar Lembaga dalam PB	1. Ceramah 2. Curah pendapat 3. Curah gagasan 4. Diskusi	1. <i>Projector</i> 2. <i>Slide</i> 3. <i>Laser point</i> 4. <i>Flipchart</i> 5. Spidol	3 JP	Test non objective: uraian singkat lisan maupun tulisan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 173 tahun 2014 tentang klaster bencana</li> <li>• Permensos No 25 tahun</li> </ul>

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/MEDIA	ESTIMASI WAKTU	EVALUASI	REFERENSI
2	Menjelaskan klaster penanggulangan bencana di Indonesia.	Klaster penanggulangan bencana	a. Klaster PB di Indonesia b. Jenis klaster PB di Indonesia	5. Studi kasus 6. Games 7. <i>Blended Learning</i> 8. <i>Online Zoom</i> 9. LMS	6. Kertas metaplan			2015 tentang klaster pengungsian • Permenkes No 175 Tahun 2015 tentang klaster kesehatan, • Perban 6 tahun 2022 tentang logpal • Permendikbud tentang SPAB
3	Menjelaskan kerjasama internasional dalam PB	Kerjasama internasional dalam PB	a. Mekanisme penerimaan bantuan PB internasional b. Mekanisme pemberian bantuan PB internasional					